

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RKL-RPL)
PERTAMBANGAN BATUBARA PT. ADARO INDONESIA DI KABUPATEN
TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

***THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT AND MONITORING PLAN (RKL-RPL) OF PT ADARO
INDONESIA COAL MINING AT TABALONG DISTRICT, SOUTH
KALIMANTAN***

Iid Moh. Abdul Wahid, S.Si, MIL⁽¹⁾, Budhi Gunawan, M.A, Ph.D⁽²⁾, dan Dr.Teguh Husodo, M.Si⁽²⁾

⁽¹⁾Program Studi Magister Ilmu Lingkungan – Universitas Padjadjaran Bandung

Email: iidblhdtabalong@gmail.com

⁽²⁾Program Studi Magister Ilmu Lingkungan – Universitas Padjadjaran Bandung

ABSTRACT

Environmental Impact Assessment (EIA) is a planning and preventive document. This is one of the environmental protection and management efforts in order to prevent environmental damage. In Tabalong there are more than 30 business agent and / or activities that have made EIA mining, 24 of which are mining operations. PT Adaro Indonesia is the largest company in Tabalong with a concession area of 35,536 hectares and a production capacity of 80 million tons / year and has had environmental documents (EIA) and Environmental Permit. During this time PT. Adaro Indonesia, in operation, has been carrying out management and environmental monitoring (RKL-RPL) in the area of mining, but on the other hand the number of public complaints due to alleged pollution and / or destruction of the environment by the activity of PT. Adaro Indonesia remains the case that many questioned the implementation of its EIA (RKL-RPL). This research aims to study the effectiveness and the factors that affect the implementation of the EIA (RKL-RPL) coal mining PT. Adaro Indonesia. This research was conducted using qualitative-quantitative approach (mix method) with concurrent triangulation strategy model. The research data obtained through observation, interviews, questionnaires and review of the literature. The results showed that the implementation of the RKL-RPL PT. Adaro Indonesia is said to be effective with each aspect of obedience (compliance) 95%, institutional 91.67%, Monitoring (supervision) 92.86% and handling public complaints 66.67%. The factors that influence the effectiveness of the implementation of the EIA PT. Adaro Indonesia is communication and coordination, resources (staff, skills, information, authority, and facilities), regulation and government policy, funding, enforcement and legal certainty (incentives / disincentives), and bureaucratic institutional structure.

Key words : EIA, RKL-RPL, Effectiveness, PT. Adaro Indonesia

1. PENDAHULUAN

Pembangunan dan lingkungan mempunyai hubungan yang erat saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam

tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). (Penjelasan PP 27 Tahun 2012).

Hanya saja menurut Raden, dkk (2010) dalam pelaksanaannya tersebut terkadang pembangunan lebih cenderung pada pembangunan ekonomi semata dan

mengesampingkan unsur lingkungan dan, sehingga yang terjadi adalah banyaknya dampak negatif dan kerusakan lingkungan baik itu kualitas air, udara maupun tanah. Untuk mengendalikan kerusakan lingkungan tersebut maka diperlukan kontrol yang kuat dari seluruh stakeholder (perusahaan, pemerintah dan seluruh masyarakat).

AMDAL merupakan dokumen perencanaan dan pencegahan sehingga bagi kegiatan yang dinilai mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, wajib melakukan kajian lingkungan secara cermat dan mendalam termasuk rencana pengelolaan dan pemantauan. Mukono (2005) dan Soemarwoto (2014) mengatakan bahwa tujuan dan sasaran analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan melalui studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) diharapkan usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup.

Pada kenyataannya, menurut Zhuhri (2012), rekomendasi studi kelayakan lingkungan yang dilakukan oleh para pengusaha baik dalam bentuk AMDAL tidak selalu mendapatkan hasil yang optimal. Lebih dari 9.000 dokumen AMDAL telah disetujui tetapi tidak menjamin dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Penyebabnya selain belum semua komisi AMDAL berfungsi dengan baik juga karena lemahnya

penegakkan hukum dalam bidang lingkungan hidup. Oleh karena itulah efektivitas AMDAL harus ditingkatkan (Wahyono, dkk, 2012). Selain itu dari segi pemrakarsa masih ada anggapan AMDAL dan implementasinya hanya dianggap sebagai cost center (hanya memperbesar biaya/keuangan) dan menganggap tidak adanya perbedaan atau mendapat insentif/disinsentif antara yang membuat AMDAL atau tidak dan yang melaksanakan AMDAL atau tidak (Roosita, 2011).

PT. Adaro Indonesia merupakan perusahaan terbesar di Kabupaten Tabalong dengan luas konsesi 35.536 Ha dan Kapasitas Produksi 80 juta Ton/tahun, mempunyai pengaruh dan dampak yang besar bagi pembangunan perekonomian dan menyerap tenaga kerja yang lebih dari 10.000, telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan. Selama ini PT. Adaro Indonesia - dalam operasionalnya - telah melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pertambangannya dan rutin melakukan pemantauan serta pelaporan. PT. Adaro Indonesia secara formal telah mendapatkan anugerah PROPER Hijau dari tahun 2009-2013 dari KLH dan penghargaan Aditama Award dengan peringkat emas untuk pengelolaan lingkungan kesehatan dan keselamatan kerja dari Kementerian (ESDM). (SLHD, 2013).

Selama ini PT. Adaro Indonesia, dalam operasionalnya, telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di wilayah pertambangannya, tetapi di sisi lain jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup oleh aktivitas PT. Adaro Indonesia tetap. Soemarwoto

(2014 : 69) mengemukakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan AMDAL adalah dengan pelaksanaan RKL-RPL sebagai umpan balik pelaksanaan dari operasional proyek yang bersifat dinamis oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan. Dengan demikian kajian efektivitas menjadi penting dalam pelaksanaan RKL-RPL yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia. Sehingga tujuan penelitian ini adalah Mempelajari efektivitas pelaksanaan RKL-RPL pertambangan batubara PT. Adaro Indonesia dan Mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan RKL-RPL Pertambangan Batubara PT. Adaro Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif (*mix method*) dengan model *Concurrent methods* (Cresswell, 2010). Aspek yang diteliti adalah ketaatan pelaksanaan RKL-RPL, kelembagaan, pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat. Penelitian ini dibatasi pada lokasi area penambangan dan sekitarnya yang berada di Kabupaten Tabalong. Kajian efektivitas pelaksanaan RKL-RPL ini dilakukan pada tahap operasional. Kurun waktu data penelitian adalah 5 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tahun 2015 (untuk data sekunder).

Teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan observasi, wawancara dan telaah pustaka. Kriteria informan untuk teknik wawancara adalah instansi pemerintah (BLHD dan Dinas ESDM Kab. Tabalong), Pemrakarsa (PT. Adaro Indonesia) dan Masyarakat Desa sekitar pertambangan PT. Adaro Indonesia serta LSM Lingkungan.

Sedangkan tehnik analisa data kualitatif dilakukan secara naratif deskriptif. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan AMDAL PT. Adaro Indonesia dianalisis dengan *causal explanatory* (Maxwell, 2004) secara naratif dan *case analysis*.

Pengumpulan data kuantitatif dengan menggunakan angket. Analisis data kuantitatif (data sekunder) hasil studi pustaka menggunakan kriteria yang diadopsi dan dimodifikasi dari Proper yang ada dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2011 tentang Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- a) Kriteria aspek ketaatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan LH terdiri dari :Pengendalian Pencemaran Air dan air asam tambang; Pengendalian Pencemaran Udara, kebisingan dan getaran; Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PLB3); Perizinan; Reklamasi dan Revegetasi dll
- b) Kriteria aspek kelembagaan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan LH terdiri dari : Struktur kelembagaan (jumlah personil pengelola lingkungan, kualifikasi personil dan departemen/lembaga pengelola) dan Koordinasi dan komunikasi : internal dan eksternal
- c) Kriteria aspek pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan LH terdiri dari : Intensitas dan bentuk pengawasan, Proses pengawasan, Output pengawasan, SDM pengawasan dan dana pengawasan.
- d) Kriteria aspek penanganan pengaduan masyarakat

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan LH terdiri dari : Intensitas, Cara penanganan (mediasi dan pengadilan) dan Penyelesaian konflik (waktu penyelesaian, bentuk penyelesaian dan kepuasan para pihak).

Teknik analisa data kuantitatif dari telaahan pustaka dilakukan dengan skoring (nilai skoring 0-2 untuk kriteria yang berbeda) sedangkan analisa data kuantitatif dari angket dilakukan dengan perhitungan proporsi dan persentase.

Untuk kriteria efektivitas yang digunakan adalah berdasar pada kriteria di dimana semua aspek penelitian (aspek ketaatan,

kelembagaan, pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat) nilainya > 60%

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Pelaksanaan AMDAL PT. Adaro Indonesia

3.1.1. Aspek Ketaatan

Beberapa hal yang termasuk aspek ketaatan disini adalah pengendalian pencemaran air, udara, kebisingan dan getaran, pengelolaan limbah B3, penanganan muka air tanah, perizinan, dan pelaksanaan reklamasi-revegetasi. Adapun hasil penelitian dan analisis aspek ketaatan bisa dilihat pada tabel 3.1 berikut ini

Tabel 3.1. Hasil dan analisa data aspek ketaatan

Aspek Penelitian	Kriteria	Sub Kriteria	Skor	Skor PT. AI
Pengendalian Pencemaran Air	Baku Mutu	Semua parameter memenuhi baku mutu	2	2
		Ada parameter yang yang belum memenuhi baku mutu	1	
		Semua parameter tidak memenuhi baku mutu	0	
	Pemantauan	Pemantauan rutin tiap bulan	2	2
		Pemantauan tiap semester atau pertahun	1	
		Tidak melakukan pemantauan	0	
	Pemenuhan ketentuan Teknis	Mematuhi semua aturan teknis	2	2
		Belum mematuhi semua aturan teknis	1	
		Tidak mematuhi semua aturan teknis	0	
	Penanganan Air Asam Tambang	Penanganan dengan metode dry cover, sehingga keasaman tetap sesuai baku mutu	2	2
		Menggunakan dry cover tapi pH air tidak memenuhi baku mutu	1	
		Tidak dilaksanakan penanganan	0	
	Pelaporan	Pelaporan rutin tiap triwulan	2	2
		Pelaporan rutin tiap semester	1	
		Pelaporan setahun sekali atau tidak melaporkan	0	
Pengendalian Penc. Udara	Baku Mutu	Semua parameter memenuhi baku mutu	2	1
		Ada parameter yang yang belum memenuhi baku mutu	1	
		Semua parameter tidak memenuhi baku mutu	0	
	Pemantauan	Pemantauan rutin tiap triwulan	2	2
		Pemantauan tiap semester/pertahun	1	
		Tidak melakukan pemantauan	0	
	Pemenuhan ketentuan Teknis	Mematuhi semua aturan teknis seperti tercantum dalam dokumen RKL-RPL	2	2
		Belum mematuhi semua aturan teknis	1	
		Tidak mematuhi semua aturan teknis	0	
	Pelaporan	Pelaporan rutin tiap semester	2	2
		Pelaporan rutin tiap tahun	1	
		tidak melaporkan	0	
Pengelolaan Limbah B3	Pemenuhan Ketentuan Teknis	Ada TPS dan SOP sesuai dengan ketentuan teknis penyimpanan	2	1
		Ada TPS dan SOP tetapi sebagian belum	1	

	Penyimpanan	memenuhi ketentuan teknis		2
		tidak ada TPS dan SOP, atau ada TPS tapi Semua belum memenuhi ketentuan teknis	0	
	Pencatatan Jenis dan Vol LB3	Semua dilakukan pencatatan	2	2
		Sebagian saja melakukan pencatatan	1	
		Sama sekali belum melakukan pencatatan	0	
	Pengangkutan oleh Pihak ketiga	Dilakukan dengan ada surat kerjasama dengan pihak ketiga yang sudah terregister di KLHK	2	2
		Dilakukan dengan surat kerjasama pihak ketiga belum teregister KLHK	1	
		Tidak ada surat kerjasama dalam pengangkutan LB3	0	
	Pelaporan	Pelaporan rutin tiap triwulan atau semester	2	2
Pelaporan tidak rutin / pertahun		1		
Tidak melakukan pelaporan		0		
Perizinan	Izin Pembuangan Limbah Cair	Mempunyai izin PLC yang masih dalam masa aktif	2	2
		Izin dalam proses	1	
		Tidak memiliki izin	0	
	Izin TPS B3 & LB3	Mempunyai izin TPS Limbah B3 yang masih dalam masa aktif	2	2
		Izin dalam proses	1	
		Tidak memiliki izin	0	
	Surat Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Memiliki surat perjanjian kerjasama dalam masa aktif	2	2
		Surat perjanjian dalam proses	1	
		Tidak memiliki surat perjanjian kerjasama	0	
Reklamasi dan Revegetasi	Pelaksanaan Reklamasi & Revegetasi	Reklamasi & Revegetasi dilakukan semua sesuai target dalam dokumen Amdal / RPT	2	2
		Baru sebagian yang dilakukan sesuai target dalam dokumen Amdal / RPT	1	
		Tidak / belum melakukan reklamasi sama sekali	0	
	Jaminan Reklamasi	Mempunyai jaminan reklamasi di bank pemerintah sesuai ketentuan	2	2
		Jaminan reklamasi belum sesuai dengan ketentuan	1	
		Tidak mempunyai jaminan reklamasi	0	
	Pelaporan	Pelaporan rutin 3 / 6 bulan sekali kepada instansi terkait	2	2
		Pelaporan tidak rutin atau hanya tiap tahun	1	
		Tidak melaporkan	0	
Penanganan Erosi dan Sedimentasi	Teknis dan Kesesuaian dengan SOP	Sesuai SHEC.SOP.0448.R00, SOP Kerja MIHA.SOP.0555.R01, ada revegetasi (covercrop dan rumput), ada drainase dan Settling Pond	2	2
		Sesuai sebagian	1	
		Tidak sesuai semuanya	0	
		Total Skor		
Total Skor Maksimum			40	
% Skor Ketaatan			95	

Secara garis besar, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan angket aspek ketaatan sudah memenuhi kriteria untuk pengendalian air, udara, kebisingan dan getaran, perizinan, reklamasi dan revegetasi, baik itu dari segi pemenuhan administrasi, baku mutu,

kriteria teknis sampai ke pelaporan. Hanya saja ada beberapa hal mengenai lokasi pengelolaan yang hanya terfokus pada dokumen RKL-RPL, sedangkan dampak yang terjadi ada beberapa yang tidak tercover dalam dokumen seperti dampak debu, dampai muka air tanah, kebisingan

dan getara, sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

3.1.2. Aspek Kelembagaan

Dilihat dari struktur kelembagaan, PT. Adaro Indonesia telah memiliki struktur kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan yang lengkap dan telah beroperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan program peningkatan

kapasitas sumber daya manusia dilakukan secara kontinyu tiap bulan dengan pendidikan dan pelatihan-pelatihan teknis terutama dalam penambangan dan pengelolaan lingkungan hidup (K3LH).

Secara garis besar untuk penilaian aspek kelembagaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Hasil analisis aspek kelembagaan

Aspek Penelitian	Kriteria	Sub Kriteria	Skor	Skor PT. AI
Struktur Kelembagaan	Departemen / Struktur Organisasi	Mempunyai departemen/bagian khusus dalam bidang lingkungan dengan Tupoksi yang jelas	2	2
		Mempunyai lembaga pengelolaan lingk yang tidak khusus / masih terintegrasi dalam departemen lain	1	
		Tidak mempunyai lembaga/departemen lingkungan	0	
	Jumlah Personil Pengelola Lingkungan	personil > 2 orang tiap bidang pekerjaan	2	2
		Personil 1-2 orang tiap bidang pekerjaan	1	
		Personil rangkap bidang pekerjaan	0	
	Kualifikasi SDM	Sarjana > 75 % sisanya D3	2	2
		Sarjana 40-75% dari total personil	1	
		Sarjana < 40% jumlah personil	0	
Koordinasi dan Komunikasi	Internal	Selalu melakukan koordinasi dan komunikasi yang jelas, lugas dan tegas sesuai tupoksi struktur organisasi yang ada setiap melakukan program kegiatan PLH	2	2
		Belum sepenuhnya ada koordinasi dan komunikasi yang jelas, lugas dan tegas dalam melaksanakan program PLH	1	
		Tidak ada koordinasi dan komunikasi yang jelas, lugas dan tegas	0	
	Eksternal	Selalu menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah, masyarakat dan LSM dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan	2	1
		Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah, masyarakat dan LSM	1	
		Tidak melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah, masyarakat dan LSM	0	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Pendidikan dan Pelatihan	Diklat dilakukan tiap tahun	2	2
		Diklat dilakukan tiap 2 tahun	1	
		Diklat dilakukan > 2 tahun	0	
Jumlah Total Skor				11
Jumlah Skor Maksimum				12
Persentase (%) Skor				91,67

3.1.3. Aspek Pengawasan

Pengawasan Internal yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia bentuknya bisa berupa daily monitoring, mingguan dan bulanan. Proses pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Tabalong (BLHD dan Dinas ESDM) dilakukan dengan frekwensi yang berbeda seperti BLHD Tabalong melakukan pengawasan rutin ke PT. Adaro Indonesia 2 (dua) kali dalam setahun. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terhadap BLHD dan

Dinas ESDM Kabupaten Tabalong. pengawasan dapat dilihat pada tabel
Adapun hasil analisis aspek berikut :

Tabel 3.3. Hasil analisis aspek pengawasan

Aspek Penelitian	Kriteria	Sub Kriteria	Skor	Skor PT. AI
Intensitas dan Bentuk Pengawasan	Frekwensi Pengawasan	Dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali dari pihak luar (Pemerintah) dan rutin tiap bulan oleh pengawas PT. Adaro Indonesia	2	1
		Pengawasan oleh pemerintah tidak rutin (setahun sekali) sedangkan pengawasan PT. Adaro rutin tiap bulan	1	
		Tidak ada pengawasan dari pemerintah dan PT. Adaro Indonesia sendiri	0	
	Bentuk Pengawasan	Rutin dan tidak	2	2
		Hanya insidentil	1	
		Tidak ada	0	
Proses Pengawasan	Proses pengawasan	Menyeluruh terhadap proses pengelolaan lingkungan	2	2
		Tidak menyeluruh / pada sebagian pengelolaan lingkungan	1	
		Tidak dilakukan sama sekali	0	
Output Pengawasan	Output	Selalu Tertuang dalam Berita Acara Pengawasan /Laporan Pengawasan	2	2
		Sebagian saja tertulis sebagian tidak	1	
		Tidak tertulis	0	
	Tindak Lanjut	Selalu ditindak lanjuti untuk perbaikan proses pengelolaan lingkungan	2	2
		Jarang ditindaklanjuti	1	
		Tidak ada tindak lanjut	0	
SDM	Personil Pengawasan	Seluruh Pengawas/superintendent telah memiliki kualifikasi pengawas	2	2
		Sebagian saja yang sudah memenuhi kualifikasi	1	
		Sebagian besaar belum memiliki kualifikasi	0	
Pendanaan	Anggaran	Mempunyai anggaran yang prioritasnya sama dengan program program lain seperti CSR dsb	2	2
		Mempunyai anggaran tetapi dengan prioritas rendah	1	
		Tidak ada anggaran	0	
Jumlah Total Skor				13
Jumlah Skor Maksimum				14
Persentase (%) Skor				92.86

3.1.4. Aspek Penanganan Pengaduan Masyarakat pengaduan masyarakat dapat dilihat
pada tabel berikut :

Adapun hasil analisis
perhitungan aspek penanganan

Tabel 3.. Hasil analisis aspek penanganan pengaduan masyarakat

Aspek Penelitian	Kriteria	Sub Kriteria	Skor	Skor PT. AI
Intensitas Pengaduan	Jumlah Pengaduan	0 - 5 Pengaduan masyarakat/tahun	2	1
		6-10 pengaduan masyarakat/tahun	1	
		Lebih dari 10 pengaduan masyarakat/tahun	0	
Cara Penanganan Pengaduan	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dan ditangani	100% ditindaklanjuti dan ditangani	2	2
		Sebagian ditindaklanjuti	1	
		Tidak ditindaklanjuti sama sekali	0	
	Mediasi / Pengadilan	100 % dilakukan dengan mediasi dan terselesaikan / tidak ada dengan pengadilan	2	2

		Sebagian dapat terselesaikan dengan mediasi	1	
		Sebagian besar/seluruh tidak dapat terselesaikan dengan mediasi, harus dengan pengadilan	0	
Penyelesaian Konflik	Waktu Penyelesaian	Penyelesaian konflik/kasus dilakukan dalam 0 - 30 hari	2	1
		Penyelesaian konflik/kasus dilakukan dalam 1 - 6 bulan	1	
		Penyelesaian konflik/kasus dilakukan lebih dari 6 bulan	0	
	Bentuk Penyelesaian	Win-win solution dengan dapat mengkompensasi kerugian penerima dampak negatif dalam bentuk kompensasi, ganti untung, tali asih dsb	2	1
		Sebagian saja yang dilakukan dengan win-win solution dan sebagian saja yang dikompensasi	1	
		Tidak dapat mengkompensasi kerugian / Tidak ada keuntungan dari para pihak terutama masyarakat	0	
	Kepuasan para pihak	Semua pihak merasa puas dengan hasil penanganan pengaduan masyarakat	2	1
		Sebagian pihak merasa puas dengan hasil penanganan konflik / pengaduan masyarakat	1	
		Masyarakat sebagian besar atau 100% tidak merasa puas	0	
Jumlah Total Skor				8
Jumlah Skor Maksimum				12
Persentase (%) Skor				66,67

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas diperoleh untuk nilai prosentase aspek ketaatan sebesar 95%, kelembagaan 91,67%, pengawasan 92,86% dan penanganan pengaduan masyarakat sebesar 66,67%. Hal ini jika dimasukkan ke dalam kriteria efektifitas yang ada maka pelaksanaan RKL-RPL PT. Adaro Indonesia bisa dikatakan efektif, tentunya dengan beberapa catatan.

3.2. Evaluasi Efektivitas dan Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan RKL-RPL

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan AMDAL PT. Adaro Indonesia secara yuridis formal sesuai ketentuan AMDAL dan Izin Lingkungan yang telah

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 174 dan 175 tahun 2012 sudah Efektif dilaksanakan. Efektivitas implementasi suatu kebijakan dalam hal ini AMDAL pertambangan batubara PT. Adaro Indonesia menurut George Edward III (1980) dalam Nugroho (2012) dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor utama yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

3.2.1. Komunikasi

Faktor komunikasi disini mencakup: transmisi, konsistensi dan kejelasan. Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat disertai dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga pelaksana di lapangan tidak mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. PT. AI sudah melakukan hal tersebut dengan baik.

3.2.2.Sumber Daya (Staf, Skill, Informasi, wewenang dan Fasilitas)

Edward mengatakan bahwa ketersediaan sumber daya sangat penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa ketersediaan sumber-sumber yang memadai maka kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah ada realisasi (Nurhaeni, dkk., 2011)

3.2.2.1. Staf dan Personel

PT. Adaro Indonesia mempunyai jumlah personel yang lengkap sesuai dengan jabatan dan fungsinya masing masing. Data personel tahun 2013 adalah 1.047 personel sedangkan tahun 2014 bertambah menjadi 1.102 personel/staf. Personel PT. Adaro Indonesia dipilih melalui seleksi dengan kualifikasi keahlian sesuai bidang pekerjaannya. Untuk meningkatkan skill staf nya PT. Adaro Indonesia melatih dan mentraining secara rutin dan kontinyu.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Edward dalam Agustino (2006) yang mengatakan bahwa sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Penambahan jumlah staf dan

implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri

3.2.2.2.Informasi

PT. Adaro Indonesia dalam melaksanakan AMDAL nya dilakukan dengan pembagian dan mentransmisikan informasi kebijakan yang telah ada kepada para staf pelaksana di lapangan melalui garis komando dan koordinasi yang ada. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Pelaksana harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

Salah satu bentuk nyata transmisi informasi tersebut adalah dalam pengawasan. Baik itu pengawasan secara internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum BLHD Kabupaten Tabalong yang dicross check dengan Inspektur tambang dan Section Head Monitoring, Analysis & Evaluation PT. Adaro Indonesia, pengawasan yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal dilakukan secara intensif sesuai dengan jalur perintah dan koordinasi yang ada. Sedangkan secara eksternal dilakukan oleh BLHD Kabupaten Tabalong dan Dinas ESDM Kabupaten Tabalong masing masing 2-4 kali dalam setahun. Pengawasan yang intensif dan rutin inilah yang dapat mengarahkan pada efektivitas

pelaksanaan AMDAL pertambangan batubara PT. Adaro Indonesia terutama dalam pemenuhan ketaatan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

3.2.2.3.Wewenang

Kewenangan pada umumnya dibuat secara formal agar menjadi legitimasi yang kuat dalam melaksanakan perintah. PT. Adaro Indonesia sadar akan hal ini, sehingga untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan dalam hal ini RKL-RPL pada AMDAL maka dibentuk struktur kelembagaan yang jelas beserta tugas dan fungsinya masing masing. Sebagai contoh dengan dibentuknya Departemen Mine Service yang membawahi Waste Water Management Section, Mine Infrastructure Construction Section maka kewenangan untuk Waste Water Management Section adalah mengelola limbah cair pertambangan yang berada di Settling Pond. Sedangkan kewenangan Mine Infrastructure Construction Section adalah berhubungan dengan pembuatan infrastruktur yang diperlukan dalam pertambangan seperti pembuatan Settling Pond (kolam pengendapan).

3.2.2.4.Fasilitas

PT. Adaro Indonesia mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas pendukung yang dimiliki PT. AI dalam melaksanakan RKL-RPL dalam AMDAL antara lain adalah: Settling Pond (kolam pengendapan), Sarana transportasi, conveyor, Crusher, stock pile Kelanis di tepi Sungai Barito,

Perkantoran, workshop dan bangunan lainnya, sertya Kebun nursery (pembibitan) untuk menyemai bibit-bibit tanaman untuk revegetasi

3.2.3. Disposisi (Dukungan Para Pelaksana)

3.2.3.2.Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat oleh pemerintah direspon oleh PT. Adaro Indonesia dengan mentransmisikan informasi kebijakan kepada seluruh staf dan personelnnya. Hal ini kemudian mendorong diformulasikannya kebijakan internal untuk pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik dalam bentuk SOP-SOP sebagai panduan pelaksanaan kebijakan sehari-hari sesuai dengan aturan teknis yang berlaku. Pemenuhan baku mutu PT. Adaro Indonesia baik itu untuk limbah cair maupun udara telah dilakukan dengan baik hal ini dibuktikan dengan hasil analisis laboratorium semua parameter air dan udara memenuhi baku mutu. Hal ini berlaku pula untuk pengelolaan limbah B3 dan aspek lainnya yang tercantum dalam dokumen RKL-RPL

3.2.3.3.Pendanaan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari PT. Adaro Indonesia, dana yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan pada tahun 2011 adalah sebesar kurang lebih 61 Milyar rupiah. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengelolaan limbah, reklamasi, monitoring/pengawasan dan penataan perizinan

Sedangkan untuk dana jaminan reklamasi PT. Adaro Indonesia pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp 29.712.269.987,00. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan

anggaran pengelolaan untuk kegiatan reklamasi dan revegetasi dibandingkan tahun sebelumnya. Sebenarnya kalau melihat dana pengelolaan limbah, reklamasi, pengawasan dan pemenuhan ketaatan jika dibandingkan dengan dampak yang terjadi sangatlah kurang. Hanya saja dengan pengelolaan yang baik efektif dan efisien diharapkan mampu meminimalisir dampak yang akan terjadi.

3.2.3.4. Insentif dan Disinsentif

Pemberian insentif dan disinsentif yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia sejalan dengan yang dikemukakan oleh Edward III dalam Agustino (2006) yang menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

3.2.4. Kelembagaan / Struktur Birokrasi

Pelaksanaan implementasi kebijakan oleh PT. Adaro Indonesia dalam mengelola lingkungan hidup tidak terlepas dari adanya kelembagaan dan struktur organisasi pelaksana kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam pengelolaan lingkungan tersebut PT. Adaro Indonesia telah mempunyai

struktur kelembagaan yang lengkap baik dari pembagian wewenang pelaksanaan tugas, personel pelaksana, dan Standard Operating Procedure.

Pembentukan struktur organisasi oleh PT. Adaro Indonesia dengan pembagian wewenang sesuai tugas dan fungsinya yang disertai dengan SOP ini sejalan dengan yang dikemukakan Edward III dalam Agustino (2006) bahwa ada dua karakteristik birokrasi, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. SOP berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit organisasi seperti legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Pelaksanaan RKL-RPL pertambangan batubara PT. Adaro Indonesia secara yuridis formal sudah dikatakan Efektif. Faktor yang menjadi pendorong pelaksanaan RKL-RPL pertambangan batubara PT. Adaro Indonesia menjadi efektif adalah:

- Proses komunikasi dan koordinasi yang intensif baik internal maupun eksternal terutama dalam transmisi informasi regulasi & kebijakan pemerintah, SOP, dan hal hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
- Sumber daya yang mencakup staf yang memadai secara kuantitas dan

kualitas (skill), adanya wewenang yang jelas dan fasilitas yang cukup dan memadai dalam pengelolaan lingkungan hidup

- Adanya dukungan para pelaksana (disposisi) terutama dalam hal : regulasi dan kebijakan pengelolaan lingkungan yang jelas dan tegas baik dari pemerintah maupun dari PT. Adaro Indonesia; dukungan pendanaan dan anggaran pengelolaan lingkungan hidup; Serta adanya mekanisme insentif dan disinsentif (penegakkan hukum) yang jelas dan tegas dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
- Struktur birokrasi kelembagaan yang memadai berupa adanya struktur organisasi dengan kewenangan yang jelas disertai dibuatnya *Standard Operating Procedure* (SOP) di setiap pelaksanaan kegiatan sehari-hari di lapangan.

4.2. Saran

Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan RKL-RPL PT. Adaro Indonesia efektif tetapi itu semua dilakukan secara yuridis formal. Hasil observasi (de facto) menunjukkan masih banyak dampak yang belum dikelola di beberapa lokasi karena tidak terprediksi saat penyusunan AMDAL. Dampak tersebut berupa getaran, kebisingan, penurunan muka air tanah untuk daerah di kecamatan Haruai dan Upau yang belum terakomodasi dalam RKL-RPL. Oleh karena itu sudah selainya PT. Adaro Indonesia melakukan revisi atau adendum AMDAL nya dalam hal ini RKL-RPL.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya

kepada : 1) Pusbindiklatten Bappenas dan Pemda Kabupaten Tabalong atas beasiswa dan izin yang telah diberikan untuk studi; 2) Manajemen dan Dosen Prodi Magister Ilmu Lingkungan UNPAD, atas ilmu yang diberikan selama masa studi; 3) Keluarga tercinta atas dukungan moril dan materil selama masa studi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV Alfabeta. Bandung
- Anonim, 2013. *PT Adaro Energy's Annual Report 2013*. <http://www.adaro.com/wp-content/uploads/2014/04/Adaro-Energy-Annual-Report-2013-English.pdf>
- Anonim, 2014. *PT. Adaro Energy's Annual Report 2014*. <http://www.adaro.com/wp-content/uploads/2014/04/Adaro-Energy-Annual-Report-2014-English.pdf>
- Anonim. 2011. *Sustainability Report of PT. Adaro Indonesia*. <http://www.adaro.com/>
- Bataineh, Ramzi H. 2007. *The Effectiveness of the Environmental Impact Assessment (EIA) follow up with regard to Biodiversity conservation in Azerbaijan*. International Journal of Environmental Quality Management. Vol. 18. No. 5 : 591-596.
- Cresswell, J.W. 2013. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Cetakan III. Pustaka Pelajar. Jogjakarta
- Goesty, P. A., A. Samekto dan D.P. Sasongko. 2012. *AnalisisPenaatan*

- Pemrakarsa Terhadap Kegiatan Bidang Kesehatan di Kota Magelang Terhadap Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup*. Universitas Diponegoro. Semarang. Jurnal Ilmu Lingkungan. Vol. 10 Issue 2 : 89-94
- Hadi, Sudartha P. 2014. *Bunga Rampai Manajemen Lingkungan*. Cetakan 1. Penerbit Thafa Media. Bantul. Yogyakarta
- Irawati, Vivin. 2008. *Kajian Implementasi Kebijakan Kewajiban AMDAL di Kabupaten Kendal*. Thesis. Prodi Magister Ilmu Lingkungan. Universitas Padjajaran. Bandung
- KLH. 2012. *Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah*. Asdep Kelembagaan KLH RI. Jakarta
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy for the Developing Countries*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nurhaeni, Ismi D. A., S.K. Habsari dan S.I. Listyasari. 2011. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Anggaran Responsif Gender*. UNS. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 11, Nomor 1, Januari 2011: 74 - 86
- Puluhulawa, F.U., 2011. *Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakkan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Universitas Negeri Gorontalo. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 11 Nomor 2 : 306-316
- Riduwan. 2013. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Cetakan kesepuluh. Alfabeta. Bandung
- Roosita, Hermien. 2011. *Pengertian, Manfaat dan Proses Amdal. Modul Pelatihan AMDAL Penyusun*. Kementrian Lingkungan Hidup RI. Jakarta
- Sadler, Barry. 1996. *International Study of the Effectiveness of Environmental Assessment : Final Report Environmental Assessment in a changing world (evaluating practice to improve performance)*. IAIA. Canada
- Sandi, Febrya T.A.H. 2013. *Implementasi Penerbitan Izin Lingkungan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan*. Thesis. Universitas Brawijaya. Malang.
- Soemarwoto, Otto. 2014. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Edisi Keempatbelas. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Tias, Nunung Prihatining. 2009. *Efektivitas Pelaksanaan Amdal Dan UKL-UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kudus*. Thesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Wahyono, Suntoro, dan Sutarno. 2012. *Efektivitas Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Pacitan Tahun 2012*. Jurnal EKOSAINS, Vol. IV No. 2 Juli 2012
- Zuhri, Mohd. 2012. *Efektivitas Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Dan Upaya Pengelolaan*

*Lingkungan Dan Upaya
Pemantauan Lingkungan
(UKL-UPL) Dalam Pengelolaan*

*Lingkungan Hidup Di
Kabupaten Siak. Skripsi.
Universitas Riau. Pekanbaru.*